



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CATUR SARWANTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 638600

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 739.535.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 329.535.000
2. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/24 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV PRAGTIGE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 127.903.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 361.957.338

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.542.195.338

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.542.195.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.